

PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA MISKIN

Pengalaman Plan Internasional di Kota Surabaya

Yanuar Farida Wismayanti

ABSTRAK

Kemiskinan di Indonesia terus menerus mengalami kondisi yang memprihatinkan. Berbagai upaya pemerintah dilakukan dalam rangka memerangi kemiskinan. Mulai dari program yang bersifat charity sampai dengan issue pemberdayaan. Evaluasi partisipatif tentang program Pemberdayaan ekonomi di Kota Surabaya ini merupakan penelitian deskriptif, dengan pendekatan partisipatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat serta adanya fasilitasi dari Plan International cukup memberikan dampak bagi peningkatan pendapatan keluarga, meskipun belum cukup signifikan. Proses perencanaan dilakukan secara partisipatif, serta pelaksanaannya mengacu pada program-program pemberdayaan Renstra Penanggulangan Kemiskinan Depsos RI tahun 2006-2010. Melalui program keterampilan (life skills), mendorong keluarga miskin untuk mengembangkan sumberdaya dan potensi ekonominya. Namun demikian perlu dikembangkan sistem pemasaran dan jaringan kerja untuk menghindari kegagalan program. Rekomendasi yang tidak kalah pentingnya adalah sistem pendampingan sosial masyarakat secara intens, serta menjamin sustainability program.

Kata kunci : Pemberdayaan ekonomi, keluarga.

I. PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk mengembangkan dan menetapkan strategi dalam rangka mengurangi kemiskinan. Namun demikian masih terdapat kendala dalam merencanakan suatu kerangka pengurangan kemiskinan yang beralih dari pendekatan terpusat, mengutamakan kesejahteraan, dan berorientasi proyek menjadi pendekatan yang lebih menyeluruh, pro-kaum miskin dan benar-benar bersifat kebutuhan setempat.

Berbagai program digulirkan dengan harapan akan mampu menanggulangi kemiskinan di Republik ini. Mulai dari program *charity*, bantuan bersyarat maupun program pemberdayaan mulai diluncurkan oleh Pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta bantuan donatur asing. Sementara ini, seringkali program-program yang digulirkan lebih bernuansa bantuan tanpa syarat (*charity*), sehingga *sustainability* dari program tersebut tidak mampu menjawab persoalan masyarakat serta memutus rantai kemiskinan. Contoh kasus, program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diluncurkan beberapa tahun lalu ternyata tidak

mampu menyelesaikan persoalan kemiskinan secara berkelanjutan. Meskipun di satu sisi, telah mampu menolong beberapa keluarga dalam pemenuhan kebutuhan "mendesak" untuk keluarga. Kedepan, diharapkan program-program yang digulirkan mampu menjawab persoalan masyarakat miskin dengan mempertimbangkan keberlanjutan program (*sustainability*).

Konsep Pemberdayaan (*empowerment*) mulai tampak ke permukaan sekitar dekade 1970 an, dan terus berkembang sepanjang dekade 1980-an hingga 1990-an (akhir abad ke-20). Konsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan masyarakat selalu dihubungkan dengan konsep mandiri, partisipasi, jaringan kerja dan keadilan. Pada dasarnya, pemberdayaan diletakkan pada kekuatan tingkat individu dan sosial. Dalam pemberdayaan ini yang penting adalah bagaimana mendudukan masyarakat pada posisi pelaku pembangunan yang aktif, bukan penerima pasif. Konsep gerakan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, mengutamakan inisiatif dan kreasi masyarakat, dengan strategi pokok memberi kekuatan (*power*) kepada masyarakat.

Masyarakat dalam hal ini yang lebih memahami kebutuhan dan permasalahannya harus diberdayakan agar mereka lebih mampu mengenali kebutuhan-kebutuhannya, merumuskan rencana-rencananya serta melaksanakan pembangunan secara mandiri dan swadaya. Oleh karena itu seluruh warga masyarakat harus selalu bekerja sama, bahu-membahu, saling membantu dan mempunyai komitmen moral dan sosial yang tinggi. Sementara itu, untuk memasyarakatkan gerakan pemberdayaan, ada beberapa aspek dan tingkatan yang perlu diperhatikan, seperti 1) perumusan konsep, 2) penyusunan model, 3) proses perencanaan, 4) pelaksanaan pemberdayaan, 5) pemantauan dan penilaian hasil pelaksanaan dan 6) pengembangan pelestarian gerakan pemberdayaan. (Harry Hikmat, 2001: 15).

Model Pemberdayaan masyarakat, tidak hanya mengembangkan potensi ekonomi rakyat, tetapi juga harkat dan martabat serta rasa percaya diri dan harga diri serta terpeliharanya tatanan nilai budaya setempat. Dalam kaitan Komisi *Human Resources Development dari Economic and Social Commission for Asia and the Pasific (ESCAP)* sejak 1999 telah merekomendasikan pentingnya strategis pemberdayaan masyarakat secara partisipatif dalam melaksanakan agenda pembangunan sosial. Selanjutnya *United Nations Development Program (UNDP)* juga telah menekankan pengembangan manusia, dengan sasaran peningkatan *capacity building* dalam rangka pengembangan masyarakat secara utuh dalam program pembangunan nasional. Selanjutnya beberapa lembaga swadaya masyarakat lokal mulai mengadopsi konsep pemberdayaan masyarakat, di antaranya *INSIST Yogyakarta* dengan program pendampingan bagi kelompok petani, *YPR (Yayasan Peduli Rakyat) Yogyakarta* dengan program pendampingan komunitas *Kali Code*, *Yayani Insani* dengan program pendampingan komunitas anak jalanan di Kota Surabaya serta lembaga lainnya.

Plan International Indonesia, melalui *Livelihood Program Guideline*-nya melihat bahwa tujuan utama dari *Livelihood Program* adalah meningkatkan keamanan pangan (*food security*) dan pendapatan keluarga (*Family income*). Kedua kondisi tersebut dipandang sebagai syarat mutlak bagi terwujudnya

kesejahteraan anak (*childs welfare*). Melalui program yang dikembangkan oleh *International NGO* tersebut diharapkan mampu memberikan dampak yang lebih baik bagi kesejahteraan keluarga miskin, untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarga khususnya bagi anak-anak. Dengan menyentuh bagian akar rumput yaitu pendekatan *community based*, diharapkan mampu mendorong partisipasi masyarakat serta mendukung sistem sumberdaya sosial di masyarakat dalam mengupayakan kemampuan ekonomi keluarga miskin dengan memastikan peningkatan kondisi ekonomi keluarga yang diharapkan mampu memberikan keuntungan sosial kepada anaknya.

Dalam upaya melihat proses serta hasil pembelajaran dari Program *Plan International* di Kota Surabaya, khususnya *Livelihood Program*, penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan di bawah ini : 1) Bagaimana proses perencanaan dan pelaksanaan pemberdayaan ekonomi keluarga miskin?, 2) Sejauhmana tingkat keberhasilan dan kegagalan program pemberdayaan ekonomi keluarga miskin?

II. METODOLOGI PENELITIAN

Evaluasi partisipatif tentang program Pemberdayaan ekonomi di Kota Surabaya ini merupakan penelitian deskriptif, dengan pendekatan partisipatif. Lokasi pelaksanaan penelitian di Kota Surabaya meliputi kelurahan Sumurwelut, Bangkingan, Sambikerep, Wonokromo, Gunung Anyar Tambak, Medokan Ayu, Rungkut Kidul, Rungkut Tengah, Wonokusumo, Wonorejo, Sidotopo dan Gunung Anyar. Pelaksanaan evaluasi dilaksanakan pada tahun 2005. Teknik pengumpulan data melalui 1) Wawancara ; dengan sampelnya adalah masyarakat penerima manfaat program pemberdayaan ekonomi, dengan penarikan sampel secara *purposive random*, sehingga setiap kelurahan dapat terwakili terhadap 60 orang, 2) Diskusi Kelompok Terfokus, atau biasa disebut dengan *FGD (Focus Group Discussion)*. Dilakukan kepada kelompok masyarakat sebagai penerima manfaat pada tiap lokasi pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi, 3) Observasi, dengan melakukan peninjauan langsung ke beberapa daerah yang

dilaksanakan program pemberdayaan ekonomi. Informan dalam penelitian ini adalah kelompok masyarakat penerima manfaat program pemberdayaan ekonomi yang digulirkan oleh Plan International, tokoh masyarakat, aparat RT/RW dan pengurus KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat). Selanjutnya data yang terkumpul dilakukan analisis data secara deskriptif, yang tergalil dari berbagai sumber lapangan dengan teknik-teknik: wawancara mendalam, observasi, FGD yang direkam dalam catatan lapangan.

III. TINJAUAN PUSTAKA

Pembangunan adalah arus ekspansi kapital yang memiliki logika tersendiri. Kaum profesional sering sulit untuk berorientasi kepada rakyat, karena mereka dibayar oleh penguasa kapital. Itu semua terjadi karena sejak dari semula pembangunan memang tidak dari rakyat, dan akhirnya bukan hanya tidak untuk rakyat, tetapi juga oleh rakyat.¹

Kemiskinan terbagi menjadi kemiskinan temporal, yaitu kemiskinan yang sifatnya sementara yang diakibatkan oleh keadaan alam seperti paceklik atau karena terjadinya proses politik sebuah negara dalam memperebutkan kekuasaan. Contoh jelas dari kasus kemiskinan politik secara temporal adalah ketika pada tahun 1995 terjadinya politik multi partai yang kemudian pada jaman Orde Baru berubah menjadi tripartai, dan saat reformasi kembali menjadi multi partai.²

Menurut *Urban Poor Consortium* bahwa kemiskinan yang terjadi di Indonesia adalah bentuk kemiskinan struktural atau buatan karena sebenarnya secara alamiah Indonesia mempunyai cukup potensi dan sumberdaya yang cukup untuk mengatasi kemiskinan.³ Menurut Witono (1995)⁴ dinyatakan bahwa pengentasan kemiskinan haruslah merupakan bagian integral dari falsafah dan praksis pembangunan sebab hakekat pembangunan adalah mengatasi kemiskinan dalam dimensinya yang paling luas. Sementara itu, Hardiman dan Midgley (1982:33) membedakan tiga pendekatan dalam mengukur kebutuhan pokok yang identik dengan kemiskinan. Ketiga pendekatan tersebut adalah pengukuran garis kemiskinan, indikator taraf hidup dan indikator ketimpangan. Indikator

garis kemiskinan menggunakan asumsi pada tingkat pendapatan atau *income* tertentu seseorang dapat hidup secara minimal sesuai harkat martabatnya sebagai manusia. Apabila seseorang berada di bawah level tersebut dikatakan berada di bawah garis kemiskinan. Indikator kebutuhan pokok menurut Sjahrir (1986:44) adalah⁵ :

- 1) Tingkat kesehatan, indikatornya adalah harapan hidup sejak lahir
- 2) Tingkat pendidikan, indikatornya adalah melek huruf, jumlah murid sekolah dasar dari penduduk berusia lima sampai dengan limabelas tahun.
- 3) Tingkat pangan, indikatornya adalah persediaan kalori per kapita, atau persediaan kalori sebagai presentase dari persyaratan kalori yang dibutuhkan.
- 4) Tingkat persediaan air, indikatornya adalah presentase penduduk yang memperoleh air bersih
- 5) Tingkat angka kematian bayi, indikatornya adalah angka kematian per-seribu kelahiran
- 6) Tingkat kebutuhan sanitasi, indikatornya adalah presentase penduduk dengan fasilitas-fasilitas sanitasi.

Berkaitan dengan upaya peningkatan taraf hidup keluarga miskin, serta dalam pencapaian indikator kebutuhan pokok keluarga, maka perlu adanya sebuah proses pemberdayaan. Hal ini seiring dengan proses pembangunan masyarakat, di mana prioritas utama diberikan pada upaya untuk membangun aspek masyarakat yang juga berarti aspek manusianya. Salah satu indikasi bahwa sudah ada pembangunan pada aspek masyarakat dan aspek manusia tersebut adalah adanya peningkatan kapasitas, termasuk kapasitas untuk membangun dirinya sendiri. Dengan demikian, apabila dalam pengertian pembangunan masyarakat di dalamnya terkandung adanya proses perubahan.

Dalam konteks keluarga, pemberdayaan harus dilihat sebagai proses dan tujuan sekaligus. Karena pemberdayaan merupakan proses berkelanjutan yang berorientasi kepada terwujudnya keluarga yang berdaya, baik

secara ekonomi, sosial maupun politik, budaya dan pendidikan. Secara umum keluarga dapat didefinisikan sebagai suatu kelompok dari orang-orang yang disatukan oleh ikatan perkawinan, darah atau adopsi, merupakan susunan rumah tangga sendiri, berinteraksi dan dan berkomunikasi satu sama lain yang menimbulkan peranan-peranan sosial, sebagai suami, istri, ayah, ibu, putra dan putrinya, saudara laki-laki dan perempuan serta merupakan pemeliharaan kebudayaan bersama. Melalui hubungan peran inilah terjadi proses sosialisasi, yaitu suatu proses di mana seseorang (anak) belajar mengetahui apa yang dikehendaki oleh anggota keluarga lainnya dan warga masyarakat tempat ia tinggal (Goode, 1995:1 dalam buku Model Pemberdayaan Anak Jalanan Berbasis Keluarga, 2004:14) Dimana dalam keluarga tersebut mempunyai fungsi-fungsi dalam masyarakat, di antaranya fungsi kelahiran (reproduksi), pemeliharaan fisik dan psikis anggota keluarga, penempatan anak dalam masyarakat (pendidikan), sosialisasi diri dan kontrol sosial (Goode, 1995:1 dalam buku Model Pemberdayaan Anak Jalanan Berbasis Keluarga, 2004:15)

Pemberdayaan keluarga inilah yang merupakan basis pengembangan masyarakat (*community development*), di mana keluarga merupakan sendi utama, tulang punggung pendidikan, pengasuhan dan pelayanan anggota keluarga termasuk anak-anak, serta terjadinya interaksi antar anggota keluarga dalam memainkan peran dan fungsi sosialnya di masyarakat.

Selanjutnya, menurut Suharto (2006:58) Pemberdayaan (*empowerment*) menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan; (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa yang mereka perlukan; dan (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Tujuan utama pemberdayaan ini adalah

untuk memperkuat kekuasaan masyarakat, khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan, baik karena kondisi internal (misalnya persepsi mereka sendiri), maupun karena kondisi eksternal (misalnya ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil). Masih menurut Suharto (2006:60), kelompok yang dapat dikategorikan sebagai kelompok lemah atau tidak berdaya ini meliputi :

1. Kelompok lemah secara struktural, baik lemah secara kelas, gender maupun etnis.
2. Kelompok lemah khusus, seperti manula, anak-anak dan remaja penyandang cacat, gay dan lesbian, masyarakat terasing.
3. Kelompok lemah secara personal, yakni mereka yang mengalami masalah pribadi dan atau keluarga.

Kondisi lemah atau tidak berdaya dari kelompok tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya ketiadaan jaminan ekonomi, ketiadaan pengalaman dalam arena politik, ketiadaan akses terhadap informasi, ketiadaan dukungan finansial, ketiadaan pelatihan dan adanya ketegangan fisik maupun emosional (Suharto, 2006)

Dalam proses pemberdayaan ini, memerlukan upaya yang menyeluruh di masyarakat, sehingga bisa terukur tingkat keberhasilannya. Keberhasilan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari keberdayaan mereka yang menyangkut kemampuan ekonomi, kemampuan mengakses manfaat kesejahteraan, dan kemampuan kultural dan politisi (Suharto;2006). Dengan mengacu pada strategi program pemberdayaan Fakir Miskin (Depsos, 2005) meliputi : 1) partisipasi sosial, 2) pengembangan budaya kewirausahaan, 3) pengembangan budaya menabung, 4) Kemitraan Sosial, 5) advokasi sosial, 6) penguatan kapasitas SDM dan kelembagaan, 7) aktualisasi nilai-nilai spiritualitas dan kearifan lokal.

Dalam pemberdayaan ini, ada beberapa prinsip-prinsip dalam penerapan pendekatan PRA (*Participatory Research Approach*), di antaranya (Harry Hikmat ; 2001) :

1. Masyarakat dipandang sebagai subjek bukan objek

2. Praktisi berusaha menempatkan posisi sebagai "insider" bukan "outsider"
3. Lebih baik mendekati benar daripada benar-benar salah untuk menentukan parameter yang standar.
4. Masyarakat yang membuat peta, model, diagram, pengurutan, memberi nilai/angka, mengkaji/menganalisis, memberikan contoh, mengidentifikasi dan menyeleksi prioritas masalah, menyajikan hasil, mengkaji ulang dan merencanakan kegiatan aksi.
5. pemberdayaan dan partisipatif masyarakat dalam menentukan indikator sosial (indikator evaluatif partisipatif).

Dalam kaitan dengan pemberdayaan masyarakat, diperlukan peran semua pihak mulai dari Pemerintah, Masyarakat, serta Dunia Usaha. Salah satu komponen dalam masyarakat tentunya adalah adanya peranan pihak luar yang mendukung proses pemberdayaan, biasa disebut dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Konsep-konsep kunci dalam pengembangan swadaya (Koenraad Verhagen; 1984 dalam buku Model Pemberdayaan Anak Jalanan Berbasis Keluarga, 2004; 27) di antaranya :

1. *Swadaya*, adalah setiap sukarela yang dilakukan oleh seorang individu atau sekelompok manusia bertujuan untuk pemuasan kebutuhan atau aspirasi individual atau kolektif.
2. *Kegiatan-kegiatan ekonomi*, adalah seluruh kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang terkait dengan produksi barang-barang material atau jasa dan memiliki nilai ekonomi.
3. *Organisasi Swadaya*, adalah kerangka acuan kelembagaan bagi individu atau rumah tangga yang telah sepakat untuk bekerjasama secara berkesinambungan untuk mencapai tujuan.
4. *Pengembangan Swadaya*, adalah usaha yang terencana untuk memudahkan lahirnya organisasi swadaya dan memperkuat jalannya organisasi swadaya ini.

5. *Instrumen Pengembangan Swadaya*, adalah instrumen yang diarahkan secara khusus pada organisasi swadaya dari anggotanya terdiri dari identifikasi penduduk dan kelompok sasaran.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Lokasi

Surabaya adalah ibukota Provinsi Jawa Timur, merupakan kota terbesar kedua dan kota pelabuhan terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta. Surabaya juga merupakan salah satu kota pelabuhan utama dan pusat perdagangan di Asia. Sebagai salah satu kota industri dan perdagangan, Surabaya berkembang begitu pesatnya. Komoditas perdagangan di antaranya adalah gula, tembakau, kopi, jagung, dan tapioka. Sedangkan industri utamanya meliputi galangan kapal, tekstil, produk logam dan pengolahan minyak. Karena berada di pinggir pantai, Surabaya berpotensi sebagai tempat persinggahan dan pemukiman bagi kaum pendatang (imigran). Proses imigrasi inilah yang menjadikan Kota Surabaya sebagai kota multi etnis dengan aneka ragam budaya. Beragam migrasi tidak saja berasal dari etnis-etnis Melayu, Cina, Arab, India dan Eropa tetapi juga dari berbagai suku bangsa Indonesia, seperti : Madura, Sunda, Batak, Sulawesi dan lainnya. Mereka datang, singgah dan menetap, hidup bersama serta membaaur dengan penduduk asli, membentuk pluralisme budaya yang kemudian menjadi ciri khas Kota Surabaya. Keanekaragaman tersebut, membawa dampak bagi keberlangsungan kehidupan sosial ekonomi di Kota Pahlawan tersebut. Tingginya tingkat urbanisasi ke Kota tersebut, juga turut andil dalam menyumbangkan angka kemiskinan perkotaan di Indonesia. Pendataan Pusdatin Depsos, tahun 2006 menyatakan bahwa dari jumlah total penduduk Propinsi Jawa Timur sebanyak 36.395.798 jiwa, yang terbesar berada di Kota Surabaya, dengan jumlah penduduk sebanyak 2.691.735 jiwa dengan jumlah penduduk miskin di Kota Surabaya sebanyak 249.178 jiwa, yang tersebar di 28 kecamatan.

Dari hasil wawancara diketahui pula mengenai sebaran aktifitas mata pencaharian

para responden. Yang dimaksud dengan aktifitas mata pencaharian adalah aktifitas yang memberikan pendapatan, baik pendapatan utama maupun sampingan, dan dilakukan rutin pada setiap bulannya. Sebaran aktifitas, di mana yang terbesar adalah menjadi karyawan, menegaskan karakter dari masyarakat urban dibanding rural. Perbedaan utamanya adalah aktifitas ekonomi, di mana pada masyarakat urban aktifitas ekonominya berbasis pada produksi dan penyediaan jasa, sedangkan pada masyarakat urban berbasis pada pengelolaan sumberdaya alam lokal.

Tabel 1
Keragaman Mata Pencaharian Responden

| No. | Jenis Mata Pencaharian | Jumlah (orang) | Persentase |
|--------|------------------------|----------------|------------|
| 1. | Buruh Bangunan/pabrik | 8 | 11 % |
| 2. | Petani | 2 | 3 % |
| 3. | Wirusaha | 25 | 38 % |
| 4. | Ibu Rumah tangga | 5 | 8 % |
| 5. | Karyawan | 13 | 20 % |
| 6. | Sopir | 6 | 9 % |
| 7. | PNS | 4 | 6 % |
| 8. | Pengangguran | 3 | 5 % |
| Jumlah | | 66 | 100 % |

Sumber : Hasil Penelitian 2005.

Program pemberdayaan ekonomi bagi keluarga miskin ini dilaksanakan di beberapa kelurahan di Kota Surabaya yang didukung oleh NGO International Plan International Surabaya, berada di 5 Kecamatan yaitu Kecamatan Wonokromo, Lakarsantri, Sambikerep, Semampir dan Wonokromo meliputi 12 Kelurahan yaitu Kelurahan Sumurwelut, Bangkingan, Sambikerep, Gunung Anyar Tambak, Gunung Anyar, Medokan Ayu yang mewakili daerah rural, Rungkut Kidul dan Rungkut Tengah mewakili daerah semi urban serta Kelurahan Wonokromo, Wonokusumo, Wonorejo, dan Sidotopo mewakili daerah urban. Mengenai alasan pemilihan daerah didasarkan pada beberapa kriteria di antaranya:

1. Merupakan pemukiman dengan jumlah prosentasi jumlah penduduk miskin yang cukup besar, berdasarkan diskusi serta data dari Pemerintah Daerah setempat melalui kerjasama dengan Departemen Dalam Negeri RI - Plan International.
2. Kondisi kesejahteraan warga masyarakat setempat masih rendah, yang dicerminkan

oleh indikator-indikator sosial, ekonomi kependudukan.

3. Lokasi dipilih berdasarkan karakteristik komunitas yang berbeda, yaitu daerah slum area (kumuh perkotaan) serta yang mewakili daerah urban area (pedesaan di perkotaan). Di samping itu juga mewakili daerah-daerah dengan karakteristik budaya yang berbeda di antaranya, suku madura, penduduk asli setempat serta komunitas urban dari kabupaten sekitar kota Surabaya.

B. Proses Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Miskin

Dalam proses perencanaan program pemberdayaan ekonomi bagi keluarga miskin, ide awal mengenai jenis kegiatan yang akan diusulkan datang dari masyarakat. Untuk proses *Need Assesment (NA)*, dilakukan proses perencanaan melalui kegiatan CDP (*Community Development Planning*) oleh masing-masing kelompok yang dibentuk masyarakat dengan sebutan KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat). KSM tersebut merupakan organisasi masyarakat bentukan Plan yang berada di level RT atau RW dengan tujuan untuk mempermudah proses pendampingan karena masyarakatnya telah terorganisir. Hal ini mengacu pada strategi pemberdayaan masyarakat serta prinsip-prinsip dalam pendekatan *Participatory Research Approach* menurut Harry Hikmat (2001) dimana masyarakat dipandang sebagai subjek bukan objek serta partisipasi sosial, yang mengandung makna keterlibatan seluruh sasaran pemberdayaan bagi kelompok miskin dan masyarakat sekitarnya dalam setiap proses yang dilakukan. Hal ini merupakan semangat dalam menempatkan kelompok miskin sebagai subjek dalam penanganan kemiskinan, sehingga masyarakat bisa optimal dalam program pemberdayaan keluarga miskin.

Pembentukan kelompok adalah salah satu strategi yang dikembangkan oleh Plan di setiap wilayah dampungannya untuk penguatan CBO (*Community Based Organization*). Pembentukan KSM, yang lantas dikoordinasikan antara KSM tersebut oleh BKKSM (Badan Koordinasi Kelompok Swadaya Masyarakat), menjadi ciri

dari pendekatan yang dilakukan. Melalui kelompok tersebut dikembangkan program-program pemberdayaan ekonomi bagi para anggotanya. Hal ini dalam rangka penguatan kapasitas SDM serta kelembagaan (KSM) yang dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, pendampingan secara terus menerus kepada kelompok-kelompok tersebut. Beberapa pelatihan yang diberikan kepada mereka antara lain pelatihan gender, pengorganisasian masyarakat, motivasi, Konvensi Hak Anak (KHA), perencanaan dan lainnya, melalui dukungan Plan International, instansi pemerintah serta kelompok masyarakat dengan pendampingan yang intens dari CTA (*Community Transformation Agent*)-Staf lapangan Plan International.

Hasil dari perencanaan masyarakat tersebut mendasari untuk pengajuan program kepada lembaga donor, dalam hal ini Plan International Surabaya. Melalui FGD (*Focus Group Discussion*) yang dilakukan di kelurahan dampingan Plan, teridentifikasi bahwa harapan dari masing-masing penerima manfaat pada saat mengikuti program atau kegiatan bersama Plan International dapat diklasifikasikan menjadi empat hal yaitu; 1) menambah wawasan dan keterampilan, 2) meningkatkan pendapatan keluarga, 3) menambah pertemanan dan jaringan, 4) mengharapkan bantuan modal atau bantuan yang telah diterima (umumnya dalam bentuk beasiswa bagi anak mereka) tidak diputus.

Selanjutnya dalam tahap persiapan, KSM tersebut mempersiapkan proposal pengajuan kegiatan pemberdayaan ekonomi yang disepakati dalam pertemuan dengan anggota KSM. Sebanyak 61 % responden menyatakan bahwa apa yang mereka butuhkan adalah suntikan modal dalam bentuk dana. Namun demikian, harapan ini tentu perlu diverifikasi kembali, karena seringkali permasalahan yang sebenarnya adalah ketidakmampuan untuk mengenali permasalahan. Dan yang seringkali menjadi jawaban yang paling mudah, singkat dan menyenangkan.

Beberapa usulan yang seringkali muncul kaitan dengan pemberdayaan ekonomi adalah beberapa pelatihan atau kursus, seperti pelatihan menjahit, pelatihan perbengkelan, pelatihan mengemudi, pelatihan tata boga, pelatihan pembuatan kripik tempe, pelatihan

montir dan pelatihan salon/kecantikan. Hasil kunjungan lapangan menunjukkan bahwa kursus menjahit merupakan jenis intervensi yang sering dilakukan. Dari kunjungan terhadap 12 kelurahan dampingan, 7 (tujuh) di antaranya pernah diadakan kursus menjahit.

Proses pelaksanaan pelatihan diawali dengan perencanaan bersama masyarakat, selanjutnya diusulkan dalam bentuk CPR (*Community Project Request*), yang disetujui oleh KSM dan BKKSM serta mengetahui pihak Kelurahan dan Kecamatan setempat. Sedangkan pesertanya diseleksi oleh kelompok itu sendiri dengan memprioritaskan mereka yang memang membutuhkan serta menentukan beberapa kriteria sesuai kesepakatan mereka. Alat lingkaran kebutuhan mencoba untuk melihat pada apa yang sebenarnya menjadi kebutuhan dalam menjalankan suatu aktifitas produksi dalam kerangka mata pencaharian yang digeluti. Tentu masing-masing jenis aktifitas mata pencaharian memiliki kebutuhannya sendiri yang unik. Dari tiga jenis mata pencaharian yang diamati lebih dalam melalui alat ini, yaitu perias dan potong rambut, tukang bordir dan menjahit, dan usaha catering terlihat bahwa tidak dijumpai kasus bahwa jauhnya pasar penyedia bahan baku tersebut menyebabkan biaya transportasi menjadi mahal. Melihat berbagai usulan dari masyarakat, mulai muncul adanya pengembangan budaya kewirausahaan pada komunitas setempat, hal ini sejalan dengan salah satu strategi pemberdayaan masyarakat sesuai dengan Renstra Penanggulangan Kemiskinan Depsos Tahun 2006-2010. Pengembangan budaya kewirausahaan ini mengandung makna tumbuh dan berkembangnya sikap mental masyarakat untuk mau belajar dan melakukan usaha ekonomi produktif berdasarkan potensi dan kreativitas yang dimiliki. Budaya kewirausahaan ini sangat penting, dengan beberapa alasan di antaranya:

1. Kewirausahaan merupakan alternatif peningkatan taraf kesejahteraan sosial secara mandiri
2. Mengantisipasi ketergantungan keluarga miskin dari program bantuan sosial dan memberikan persepsi bantuan yang diterima merupakan stimulan untuk modal usaha

3. Perlunya kesadaran bahwa perubahan nasib dan peningkatan taraf kesejahteraan sosial tergantung dari keluarga itu sendiri.

Pengembangan budaya kewirausahaan ini dilaksanakan melalui kegiatan bimbingan sosial, motivasi, pelatihan kewirausahaan, pendampingan usaha serta akses terhadap sumber kesejahteraan sosial. Dengan adanya keterampilan serta usaha yang dimiliki diharapkan mampu meningkatkan taraf kesejahteraan keluarga. Sehingga akan mendukung adanya pengembangan menabung bagi keluarga miskin khususnya, yang akan membangun sikap mental dan kebiasaan mereka untuk menyisihkan dan menyimpan sebagian dari pendapatannya untuk kebutuhan peningkatan kualitas, atau menjamin terpeliharanya kesejahteraan sosial di masa depan.

Selanjutnya melalui proses fasilitasi dan identifikasi serta pendampingan sosial, sebenarnya masyarakat memiliki atau mampu mengakses sumberdaya-sumberdaya yang dapat digunakan untuk membantu mengatasi berbagai permasalahan di atas. Hal ini juga sejalan dengan Renstra Penanggulangan Kemiskinan Depsos Tahun 2006-2010. Melalui identifikasi sumberdaya ini maka permasalahan-permasalahan yang dihadapi menjadi lebih mudah untuk dipecahkan. Sumberdaya yang diidentifikasi terutama adalah sumberdaya sosial dan sumberdaya finansial mengingat sumberdaya alam bukanlah merupakan basis dari aktifitas ekonomi yang dikembangkan, sedangkan sumberdaya fisik bersifat lebih statis. Sumberdaya yang diidentifikasi tersebut adalah sumberdaya yang berada di tingkat lokal sehingga akses terhadap sumberdaya menjadi lebih mudah.

Sumberdaya sosial yang berada di tingkatan lokal kelurahan tersebut dapat digolongkan berdasarkan penyediannya, yaitu 1) sumberdaya sosial bentukan pemerintah, seperti PKK RW/Kelurahan, 2) sumberdaya sosial yang berbentuk atas inisiatif murni masyarakat seperti paguyuban RT/RW, dan 3) sumberdaya sosial yang inisiatif pembentukannya datang dari lembaga-lembaga pendamping masyarakat, seperti KAMUS (Kelompok Anak Medokan Ayu Surabaya) yang merupakan hasil dari pendampingan oleh Plan. Demikian halnya dengan sumberdaya finansial

yang juga dapat digolongkan berdasarkan penyediannya. Sumberdaya finansial yang disediakan oleh Pemerintah dan berada di tingkatan lokal kelurahan misalnya adalah P2KP (Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan), sumberdaya finansial yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat sendiri seperti Koperasi Simpan Pinjam RT/RW, dan sumberdaya finansial yang disediakan oleh lembaga pendamping masyarakat seperti beroperasinya Bank Yayasan Purba Danarta (Bank YPD) di Kelurahan Wonokusumo, Sidotopo, Bangkingan dan Sumurwelut. Plan International menggandeng mitra kerja Bank YPD ini, untuk memberikan pendampingan keuangan kepada masyarakat, antara lain melalui kebiasaan menabung, serta mendampingi akses sumberdaya finansial. Lembaga ini juga melakukan pengucuran kredit, serta membantu membukakan pasar bagi produk-produk yang dihasilkan oleh kelompok masyarakat, di antaranya produk tas monte. Cara membukakan pasar pun cukup menarik, yaitu dengan memberikan kredit kepada para pedagang di Pasar Sepanjang dengan syarat mau menerima produk-produk dari kelurahan yang didampingi oleh YPD.

C. Keberhasilan dan Kegagalan Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Miskin

Dari program-program yang digulirkan di antaranya adalah pelatihan menjahit, mengemudi, perbengkelan, jahe instan, katering (boga) dan pembuatan tempe keripik. Di tinjau dari sisi peningkatan pendapatan, sebanyak 13 orang responden (42 %) menyatakan bahwa mereka mengalami peningkatan pendapatan melalui penyelenggaraan keterampilan dan pendampingan yang dilakukan oleh Plan bersama mitra kerjanya. Sedangkan 18 orang lainnya (58 %) tidak mengalami peningkatan secara signifikan, hal ini disebabkan mereka masih mengalami kendala dalam menjalankan usahanya. Dari kesemua responden yang mengalami peningkatan pendapatan, 62 % di antaranya menjadikannya sebagai pendapatan utama, sedangkan 38 % lainnya adalah pendapatan sampingan. Pelatihan-pelatihan yang pada akhirnya ditindaklanjuti menjadi pencaharian utama adalah menjahit, pembuatan jahe instan, usaha katering dan montir.

Bagian yang berpengaruh secara nyata terhadap peningkatan pendapatan adalah pemberian modul dan pembentukan serta pengembangan jaringan. Pemberian modul merupakan hal yang nyata berpengaruh dikarenakan modul merupakan *upgrading tool* bagi keterampilan dan teknologi bagi penerima manfaat yang selama ini telah digunakan dalam menjalankan usahanya.

Kasus 1 ;

Ny, NN adalah seorang ibu rumah tangga biasa di pinggiran kota Surabaya, daerah itu biasa disebut Blok M (M adalah sebutan daerah komunitas Madura). Suaminya adalah pekerja musiman di sebuah pabrik di kota Pahlawan tersebut, keduanya adalah penduduk urban dari daerah Lamongan. Mereka mempunyai 2 orang anak laki-laki yang masih sekolah di bangku SMP dan SD. Ketika itu, Plan International masuk wilayah tersebut untuk melakukan program pendampingan masyarakat, dan salah satu yang didampingi adalah keluarga NN. Setelah melalui proses perencanaan dan seleksi, Ny, NN diusulkan untuk mengikuti pelatihan menjahit tingkat dasar. Dengan ketelatenan dan keuletannya, dia berhasil lulus dan mendapatkan bantuan stimulan berupa mesin jahit dari Plan, serta diusulkan kembali untuk mengikuti pelatihan menjahit tingkat lanjutan. Ny, NN mulai membuka usaha jahit di rumahnya. Lokasinya yang cukup strategis, dan hasil jahitannya yang memuaskan Ny, NN mulai mendapatkan banyak pelanggan. Usaha jahitnya berkembang cukup pesat, selanjutnya dia juga didampingi oleh Bank YPD, dan mendapatkan kucuran kredit untuk mengembangkan usahanya. Akhirnya Ny, NN bisa membeli beberapa peralatan jahit, obras, bordir dan mempunyai kios peralatan menjahit di rumahnya. Dari hasil jahitan, Ny NN bisa memperoleh penghasilan bersih Rp. 500.000-Rp.750.000 setiap bulannya. Dari penghasilannya tersebut, keluarga itu bisa membiayai pendidikan 2 (dua) anaknya yang masih sekolah, serta bisa menabung setiap harinya melalui lembaga YPD Rp. 1000-5000 setiap harinya.

Dari contoh kasus tersebut, program pemberdayaan ekonomi bagi keluarga menunjukkan pentingnya proses perencanaan yang melibatkan masyarakat, sehingga program yang digulirkan sesuai dengan

kebutuhannya. Melalui program pemberdayaan ekonomi bagi keluarga, menunjukkan fungsi keluarga sangat penting dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan bagi anak, pemenuhan kebutuhan dasar yang mengacu pada Konvensi Hak Anak serta sesuai dengan fungsi keluarga menurut Goode (1995;1).

Pembentukan dan pengembangan jaringan kelembagaan ekonomi sangat berpengaruh karena *income generating activities* membutuhkan dukungan jaringan teknologi, permodalan dan pemasaran. Belum masuknya variabel analisis pasar dan perencanaan bisnis sebagai bagian penting dalam peningkatan pendapatan, karena pada umumnya *income generating activities* melibatkan masyarakat yang telah memiliki pengalaman usaha dan pemahaman terhadap bidang yang akan digeluti sebelumnya, sehingga orientasi pasar dan rencana bisnis telah menjadi bekal yang dimiliki. Dalam implementasinya Plan International memberikan dukungan dana untuk pengembangan program jaringan kelembagaan ekonomi ini, selanjutnya mitra kerjanya yang mendampingi secara intensif kelompok-kelompok kerja tersebut. Di antaranya dengan menggandeng beberapa LSM lokal seperti Yayasan Purbadanarta serta kelompok masyarakat melalui APEKMAS (Asosiasi Pengembangan Ekonomi Masyarakat).

Untuk tingkat kerentanan (*Vulnerabilities*) dalam proses usaha untuk tingkat peningkatan pendapatan, dipengaruhi oleh pembentukan dan pengembangan jaringan. Yang dimaksud dengan kerentanan (*Vulnerabilities*) di sini adalah fluktuasi kondisi keamanan pangan yang diakibatkan oleh 1) peristiwa-peristiwa yang terjadi secara musiman/berulang (*seasonal*), 2) peristiwa-peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba (*shocks*), dan 3) kondisi-kondisi di luar yang dapat menjadi ancaman bagi perolehan penghasilan (*external threats*).

Responden menyatakan bahwa peristiwa yang termasuk dalam *seasonal vulnerabilities* adalah masa kenaikan kelas dan tahun ajaran baru bagi anak-anak mereka. Peristiwa ini berlangsung antara bulan Juni hingga Juli di setiap tahunnya. Peristiwa ini cukup menyedot penghasilan keluarga sehingga mengganggu alokasi bagi pemenuhan kebutuhan pangan. Sebanyak 16% responden dari keseluruhan responden yang mengalami kerentanan mengutarakan hal ini.

Sedangkan peristiwa yang tergolong sebagai *shocks condition* adalah masalah kesehatan keluarga. Masalah ini menuntut pembiayaan yang besar bagi pengobatannya sehingga menyebabkan alokasi penghasilan untuk memenuhi kebutuhan pangan menjadi terganggu. Sebanyak 38 % responden dari keseluruhan responden yang mengalami kerentanan menyatakan pernah mengalami hal ini.

Dari populasi responden yang sama, didapatkan bahwa kondisi-kondisi yang tergolong sebagai *external threats* adalah persaingan usaha (19 responden) dan berakhirnya masa kontrak kerja (12 % responden). Seperti halnya kursus menjahit yang menjadi favorit dalam jenis keterampilan pilihan masyarakat, pada saat responden mulai menekuni profesi ini pasca pelatihan, maka yang akan dihadapi adalah banyaknya orang yang menekuni profesi yang sama dan telah memiliki pelanggan tetap.

Hal ini sangat terkait dengan proses atau tahap pemasaran. Intervensi yang selama ini dilakukan hanya berhenti pada tahapan *lifeskill training*, dan ketika para penerima manfaat berusaha menindaklanjuti pengetahuan baru yang diduplikasinya dari hasil training, maka sebagai hal baru tentu mereka masih harus meraba-raba ketika memasuki dunia tersebut. Usaha untuk meraba-raba tersebut menjadi semakin gelap ketika hadir *external threats* berupa persaingan dari para pihak yang telah mapan dalam mengusahakan bidang yang sama. Tanpa pendampingan dan penguatan variabel pembentukan dan pengembangan jaringan, maka usaha ini akan gagal atau berhenti di tingkat "seadanya", dalam artian bergerak terbatas, hanya antara saudara atau tetangga.

Dari hasil FGD juga didapatkan bahwa upaya mereka untuk meraba-raba hal baru tersebut menjadi bertambah sulit ketika bekal ilmu dan keterampilan yang diberikan pada saat pelatihan dirasakan terbatas. Sebagian besar dari kelurahan yang disurvei, warganya yang pernah menjadi peserta pelatihan menyatakan bahwa ilmu dan keterampilan yang diberikan oleh pelatihan-pelatihan hanya sampai pada tingkat dasar atau terampil saja, dan tidak sampai hingga tingkat mahir.

Mengenai dampak program pemberdayaan ekonomi terhadap pihak non dampingan, sebanyak 69 % responden menjawab bahwa tetangga sekitar mereka yang tidak menjadi penerima manfaat termotivasi untuk turut mengikuti kegiatan. Hal ini menunjukkan bahwa tidaklah sulit untuk mencari peserta pelatihan, sehingga dapat dikembangkan semacam proses seleksi bagi calon peserta yang akan mengikuti pelatihan yang diadakan. Proses seleksi ini menjadi penting karena berdasarkan hasil wawancara dengan lembaga mitra pelaksana pelatihan, diketahui bahwa kesulitan yang muncul pada saat program pelatihan berjalan yaitu; 1) kurangnya motivasi peserta untuk mengikuti pelatihan, 2) ketidaksiplinan, 3) keterbatasan kapasitas atau ketidaksesuaian dengan minat yang menyebabkan daya serap menjadi lemah, dan 4) terkesan seenaknya sendiri. Salah satu faktor yang menyebabkan beberapa hal tersebut muncul adalah pembiayaan pelatihan yang bukan berasal dari kantong peserta sendiri, sehingga rasa untuk berjuang tidak muncul, sehingga peserta sekedar *willing to accept, but are not willing to pay* (sekedar rela menerima, tetapi tidak mau berkorban). Melalui sejenis proses seleksi, maka permasalahan tersebut di atas dapat diminimalkan.

Secara umum, masalah yang dihadapi oleh para penerima manfaat ketika ingin menindaklanjuti program yang telah diikuti adalah ; 1) ilmu dan keterampilan yang didapatkan di rasa belum cukup sebagai bekal, 2) kurangnya modal dana dan alat untuk merintis usaha, 3) pemasaran yang tersendat, 4) kurang kompaknya masyarakat dalam kegiatan-kegiatan kelompok / KSM. Meskipun isu kurang kompaknya masyarakat hanya muncul di satu kelurahan, tetapi isu ini patut untuk menjadi perhatian ketika terlihat indikasi-indikasi serupa pada kelurahan-kelurahan lain. Salah satu hal yang tampak jelas adalah ketergantungan anggota dan sikap menyerahkan segalanya kepada para pengurus KSM. Tentu satu hal yang menjadi penyebab dari kondisi ini adalah lemahnya pendampingan bagi masyarakat secara langsung dan intens. Yang diharapkan mampu menjadi mitra sejalan dalam membangun serta menumbuhkembangkan semangat kewirausahaan yang mendukung proses pemberdayaan masyarakat menuju kemandirian.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses perencanaan yang baik dalam implementasi program, merupakan kunci keberhasilan program. Sehingga dalam membuat perencanaan pemberdayaan ekonomi, sangat penting keterlibatan masyarakat sebagai subjek pelaksana program. Proses perencanaan dan pelaksanaan yang terbuka serta mempertimbangkan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat merupakan strategi dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Melalui pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi, diharapkan adanya manfaat yang dirasakan oleh masyarakat lain non dampingan atau penerima manfaat langsung. Hal ini menunjukkan adanya proses keterlibatan dari komunitas untuk terlibat dan mendukung kegiatan pemberdayaan ekonomi, sehingga berdampak bagi orang lain.
2. Implementasi program pemberdayaan ekonomi bagi keluarga miskin, diharapkan mampu meningkatkan taraf kesejahteraan penerima manfaatnya. Sehingga aktifitas program yang dilaksanakan merupakan penentu utamanya dalam peningkatan pendapatan keluarga. 28 % responden menyatakan mereka mendapatkan peningkatan pendapatan setelah ada intervensi dari Plan Internasional. Dari jumlah tersebut, 62 % di antaranya menjadikan pelatihan yang difasilitasi Plan, sebagai aktifitas mata pencaharian utama karena menghasilkan pendapatan terbesar bagi keluarga. Namun demikian, ada juga beberapa faktor yang seringkali menghambat keberhasilan program di antaranya adanya *seasonal condition*, *shock condition* dan *external threats* yang mempengaruhi pendapatan keluarga. Selain itu juga masih lemahnya pembentukan dan pengembangan jaringan pemasaran produk yang dihasilkan keluarga atau kelompok, seperti produksi konveksi, kerajinan dan produksi makanan siap konsumsi.

B. Rekomendasi

1. Bagi Plan International
 - a. Perlunya penajaman intervensi atau program pemberdayaan ekonomi bagi keluarga miskin yang sesuai dengan kebutuhan dan perlu mempersiapkan pembentukan jaringan dan pemasaran untuk hasil produksi, melalui proses perencanaan dan pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi yang partisipatif.
 - b. Mengembangkan ruang bagi tumbuhnya inisiatif-inisiatif murni yang didasarkan pada pengetahuan masyarakat akan kondisi dan permasalahan wilayahnya perlu untuk didorong dengan mempertimbangkan *local wisdom* (kearifan lokal). Karena terbukti dari beberapa studi kasus yang menunjukkan bahwa inisiatif-inisiatif tersebut lebih dapat mendorong dalam implementasi dan keberlanjutan program
2. Bagi Departemen Sosial, serta instansi pemerintah lainnya
 - a. Mengembangkan sebuah model perencanaan program pemberdayaan masyarakat, dengan mempertimbangkan partisipasi sosial, kemitraan, budaya kewirausahaan serta penguatan kapasitas SDM dan kelembagaan yang kuat dan mengakar kuat pada nilai-nilai spiritualitas dan kearifan lokal.
 - b. Mengupayakan sebuah konsep pendampingan yang komprehensif bagi kelompok dampingan dengan mengoptimalkan peran CBO (*Community Based Organization*) sebagai lembaga kontrol dalam implementasi program serta menjamin *sustainability* program.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2007, *Pemetaan Kemiskinan di Indonesia*, Pusdatin, Jakarta
- Anonim, 2005, *Rencana Strategis Penanggulangan Kemiskinan Program Pemberdayaan Fakir Miskin Tahun 2006-2010*, Depsos, Jakarta.
- Arif Rahman, dkk, 2005, *Berlanjutkah Program Keberlanjutan ; Evaluasi Livelihood Program, SALAM dan Plan International Indonesia*.
- Dawam, R.M, 1987, *Mulai Berguru dari Rakyat*, Pengantar dalam Buku Robert Chambers; *Pembangunan Desa; Mulai dari Belakang*; LP3ES; Jakarta
- Edi Suharto, 2006, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Harry Hikmat, 2004, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, Penerbit Humaniora, Bandung
- Harry Hikmat, 2001, *PRA (Participatory Research Appraisal) dalam Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat*. Penerbit Humaniora, Bandung.
- Rahmat Salam, DR, dkk, 2004, *Model Pemberdayaan Anak Jalanan Berbasis Keluarga dengan Pendekatan Multisystem*, Puslitbang UKS Depsos RI dan Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Soetomo, 2006, *Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Catatan Kaki :

- ¹ Dawam, R.M, 1987, *Mulai Berguru dari Rakyat*, Pengantar dalam Buku Robert Chambers; *Pembangunan Desa; Mulai dari Belakang*; LP3ES; Jakarta
- ² Arief Rahman dkk, Laporan
- ³ Laksmo, B.2000. *Kemiskinan Struktural. Agenda Masyarakat Sipil. Dalam Agenda Keadilan dan Pemberdayaan*
- ⁴ Witono, Joyo.1995.
- ⁵ Soetomo, 2006, *Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

BIODATA PENULIS :

Yanuar Farida Wismayanti, staf pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Departemen Sosial RI, sebelumnya pernah bekerja sebagai *Community Transformation Agent(CTA) Plan International, Project Officer CNSP (Children In Need Special Protection) Plan International* di Surabaya.